



**Sultan La Elangi (1578-1615 M)
(Arkeologi Makam Sang Perintis Martabat Tujuh di Kesultanan Buton)**

*Sultan La Elangi (1578-1615) (The Archaeological Tomb of the Pioneers
“Martabat Tujuh” in the Sultanate of Buton)*

Rismawidiawati

Peneliti pada Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Makassar
Jl. Sultan Alauddin Makassar
Email: rismawidiawati@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 13 Juli 2015</p>	<p><i>Makam-makam kuno sebagai bukti sejarah di Indonesia banyak yang sudah direnovasi dan menyisakan informasi yang sedikit tentang tokoh yang terkait dengannya, hal ini menyulitkan kajian arkeologi secara mandiri sebagaimana terjadi pada makam Sultan La Elangi yang sudah direnovasi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memberikan gambaran tentang data arkeologi makam dan peran Sultan La Elangi. Penelitian menunjukkan bahwa; Bentuk awal makam Sultan La Elangi cukup sederhana dan tidak menunjukkan kesan mewah sebagaimana layaknya seorang raja. Morfologi makam Sultan hanya terdiri dari nisan tanpa jirat permanen. Bentuk nisan menyerupai menhir tanpa ukiran yang terbuat dari endapan tetesan air gua batu, yang disebut stalaktit atau stalakmit. Hal ini dimaksudkan untuk melanggengkan suasana sejuk pada makam. Sementara peran Sultan La Elangi yaitu pada masa pemerintahannya banyak sistem yang dibuat dan ditata guna kelancaran roda pemerintahan. Diantaranya, undang-undang dasar kesultanan yang sarat dengan konsep Martabat tujuh.</i> <i>Kata Kunci: Arkeologi, makam, Nisan, Sultan La Elangi, Buton.</i></p>
<p>Revisi I 3 Agustus 2015</p>	
<p>Revisi II 28 Agustus 2015</p>	<p><i>Ancient tombs as much historical evidence in Indonesia that has been renovated and leaving little information about the figures associated with it, it is difficult for archaeological studies independently as it did in the tomb of Sultan La Elangi renovated. This study use exploratory descriptive study, namely qualitative research conducted by giving an overview of archaeological data and the tomb of Sultan La Elangi role. The results showed that; Early form of the tomb of Sultan La Elangi quite simple and does not show the impression of luxury as befits a king. The morphology of the tomb of Sultan only consist of a headstone without permanent tomb. The shape resembles a menhir without carving tombstones made of stone cave sediment water droplets, which are called stalactites or stalagmites. It is intended to perpetuate a cool atmosphere in the tomb. Related to the role of the Sultan La Elangi, during his reign many systems are made and arranged in order to smooth the wheels of government at that time. Among them, the imperial constitution is loaded with Dignity seven concepts.</i> <i>Keywords: Archaeology, tomb, headstone, Sultan La Elangi, Buton.</i></p>
<p>Disetujui 3 Nopember 2015</p>	

Pendahuluan

Kajian arkeologi yang dilakukan oleh para peneliti sangat diharapkan untuk sekaligus mengungkap sejarah masa lalu. Namun faktanya, arkeologi seringkali hanya memberi ruang interpretasi yang sangat terbatas terhadap keberadaan objek kajiannya, entah karena semakin tuanya benda arkeologisnya sehingga ia tak lagi dapat berbicara banyak tentang masa lalunya, atau karena hubungan benda arkeologi tersebut dengan sejarah masa lalu memang tidak terlalu kuat sehingga fakta-fakta kejadian yang ingin digali dari masanya menjadi sulit untuk direkonstruksi. Oleh karena itu, kajian arkeologi sangat layak disandingkan dengan kajian sejarah sebagai bahan untuk saling memberi konfirmasi terhadap kejadian masa lalu. Seperti keberadaan sebuah makam yang diyakini oleh masyarakat sebagai makam dari seorang yang sangat berperan dalam perkembangan sosial pada masa lalu, memberi kemungkinan untuk dikaji dalam dua aspek kajian baik secara arkeologis maupun dengan pendekatan sejarah. Sebab manakala makam tersebut hanya dikaji secara arkeologis semata, maka tidak akan sempurna informasi tentang peristiwa masa lalu berkaitan dengan tokoh di balik makam tersebut.

Indonesia sebagai bangsa yang banyak melalui fase kebudayaan dalam perkembangannya, memiliki potensi arkeologi yang informatif dan kontributif terhadap ketahanan budaya nasional. Kronologi perlakuan masyarakat terhadap benda arkeologi tertentu menunjukkan adanya kesinambu-

ngan budaya dari masa lalu, seperti yang terlihat dalam perlakuan masyarakat terhadap makam orang-orang penting, tampak sekali adanya perlakuan khusus yang berkesinambungan dengan masa lalu, sebagai contoh pemakaman Sultan Syarif Hidayatullah yang ditempatkan pada tempat tinggi di bukit Gunung Sembung, dan peletakan makam tokoh lainnya yang ditata secara teratur menegaskan adanya hirarki spasial di dalamnya. Kompleks makam tersebut dari bawah sampai ke atas terdiri dari 9 tingkat, pada tingkat IX ini terdapat bangunan yang dinamakan Jinem tempat makam Sunan Gunung Jati dengan istri dan keluarganya yang terdekat. Pada tingkat VIII ke bawah terdapat makam raja-raja setelah Sultan Sepuh I dan terdapat juga jalan pemisah antara kubur-kubur sebelah timur (kanan) yaitu dari Kasepuhan dan kubur-kubur sebelah barat (kiri) adalah kelompok kubur dari raja-raja Kanoman, sedangkan kubur raja-raja Kacirbonan berada di sisi timur yaitu disisi Kasepuhan (Irmawati M dan Johan, 2012: 5). Menurut Uka Tjandrasasmita (1999: 285-300) jalan pemisah antara kubur raja-raja Kasepuhan dan Raja-raja Kanoman merupakan refleksi dari perpecahan politik di antara penguasa Cirebon Pasca Sultan Girilaya (wafat 1650) (Tjandrasasmita 1999:285-300).

Hal serupa dengan perlakuan masyarakat terhadap pemakaman presiden Suharto yang di tempatkan pada posisi yang tinggi, di atas bukit Ngaglik seluas kurang lebih 4,3 hektar yang dinamakan Astana Giribangun. Peletakan makam dalam kompleks makam ini juga terlihat adanya hirarki spasial, dimana

sebelum Astana Giribangun dibangun, sudah ada kompleks pemakaman keluarga Pura Mangkunegaran, yaitu Astana Mangadeg. Di dalam astana ini terdapat makam Kanjeng Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Sri Mangkunegara I, yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sember Nyowo. Pada masa hidupnya, sang pangeran ini ialah seorang pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah keadipatian tinggi di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Jika dilihat dari letaknya, Astana Giribangun ini berada di bawah Astana Mangadeg, hal ini menunjukkan arti bahwa masih terdapat garis keturunan antara Sri Hartinah (Bu Tien) dengan keluarga Mangkunegaran III. Di kompleks pemakaman keluarga Cendana inilah presiden kedua Indonesia dimakamkan. Dan sekarang menjadi tujuan para pengunjung/peziarah dari berbagai kota di seluruh Indonesia (Junardi 2008:

<http://m.wisatamelayu.com/id/tour/835-Wisata-Religi-Astana-Giribangun/navgeo>).

Jadi makam sebagai tempat pekuburan tidaklah hanya bernilai sebagai simbol kematian, akan tetapi makam juga merupakan nilai budaya dari masyarakat masa lampau yang harus dijaga kelestariannya sebagai amanat dari Undang-Undang **Republik Indonesia No. 5 Th. 1992 Pasal 1 ayat 1 poin (a) Tentang Benda Cagar Budaya:**

“Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh)

tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan”

Karena itu, idealnya makam-makam kuno itu memang perlu dilestarikan dan dijaga keasliannya. Akan tetapi faktanya di Indonesia makam-makam itu banyak dibongkar dengan alasan untuk diperbaiki karena kondisi bangunan yang sudah hancur. Pembongkaran makam ada dilakukan dengan menghancurkan seluruh bangunan yang lama dan menggantinya dengan bangunan yang baru. Namun ada juga pembongkaran yang dilakukan sebagai upaya renovasi atau pergantian bahan-bahan yang rusak, kemudian dibangun kembali sebagaimana bentuk aslinya. Makam-makam hasil renovasi inilah yang banyak bertahan hingga saat ini, yang dapat dijadikan sebagai saksi sejarah atau sebagai bukti arkeologis yang dapat diteliti secara ilmiah. Kondisi makam yang sudah direnovasi dan menyisakan informasi yang sedikit tentang tokoh yang terkait dengannya itulah yang akan dikaji dalam tulisan ini, dengan menekankan permasalahannya tentang; bagaimanakah tinjauan arkeologi makam Sultan La Elangi?, dan bagaimanakah peran Sultan La Elangi semasa hidupnya?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif, yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan dengan memberikan gambaran tentang data arkeologi makam Sultan La Elangi, dengan

mengumpulkan dua macam data yaitu; data arkeologi dan data sejarah. Data Arkeologi diperoleh dengan langkah survey, dimana peneliti melakukan pengumpulan pengamatan terhadap data-data pisik berupa unsur, morfologi dan struktur bangunan makam. Data survei juga diperoleh dengan melacak informasi dari penduduk setempat melalui wawancara. Data sejarah diperoleh dari kepustakaan yang dikumpulkan dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti publikasi arkeologis (makam kuno) maupun sumber-sumber sejarah yang terkait (Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, 2008: 26).

Tenik pengumpulan data dilakukan melalui; Pertama; Wawancara dengan para informan dalam rangka mendapatkan informasi keberadaan makam Sultan La Elangi dan kaitannya dengan bangunan yang ada disekitarnya. Wawancara juga dapat dilakukan untuk mengetahui jenis bahan dan cara pembuatan makam, serta untuk mencari kemungkinan adanya naskah atau buku yang berkaitan makam yang diteliti. Kedua; Mengambil gambar dan mengukur desain arsitektur, denah dan aksesoris makam, mengambil gambar tampak bangunan secara utuh dan mengambil setiap detail dari struktur bangunan makam yang diteliti. Ketiga; Melakukan kajian sejarah terkait peran Sultan La Elangi sebagai tokoh dibalik makam.

Adapun tahap pengolahan data yang dilakukan dalam analisis pembahasan ini mencakup: 1) Analisis morfologi (bentuk-bentuk struktur bangunan): variabel yang diperhatikan adalah bagian-bagian

dari makam mencakup bagian jirat, nisan, dan bangunan makam (kalau ada). 2) Analisis teknologi (cara membuat): variabel yang diperhatikan adalah bahan, teknik dan konstruksi makam. 3) Analisis stilistik/gaya : variabel yang diperhatikan adalah ragam hias, baik yang dekoratif maupun yang arsitektural. 4) Analisis kontekstual (keletakan situs): variabel yang diperhatikan adalah : lokasi dan, bangunan/lingkungan sekitarnya

PEMBAHASAN

Tinjauan Arkeologi Makam Sultan La Elangi

Makam Sultan La Elangi terletak dalam Benteng peninggalan Kesultanan Buton (biasa disebut Benteng Keraton Wolio) yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama La Sangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin (1591-1596). Pada awalnya, benteng tersebut hanya dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi kompleks istana dengan tujuan untuk membuat pagar pembatas antara kompleks istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Pada masa pemerintahan Sultan Buton IV yang bernama La Elangi atau Sultan Dayanu Ikhsanuddin, benteng berupa tumpukan batu tersebut dijadikan bangunan permanen. Pada masa kejayaan pemerintahan Kesultanan Buton, keberadaan Benteng Keraton Buton memberi pengaruh besar terhadap eksistensi Kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari empat abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh.

Benteng yang merupakan bekas ibukota Kesultanan Buton ini memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur/gunung. Benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan september 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang yang disebut Lawa dan 16 emplasemen meriam yang mereka sebut Baluara. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh anda dapat menikmati pemandangan kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di selat Buton dengan jelas dari ketinggian, suatu pemandangan yang cukup menakjubkan. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Benteng ini terdiri dari tiga komponen yaitu Badili, Lawa, dan Baluara.

Di dalam kawasan benteng terdapat permukiman penduduk yang merupakan pewaris keturunan dari para keluarga bangsawan Keraton Buton masa lalu. Masyarakat yang bermukim di kawasan benteng ini juga masih menerapkan budaya asli yang dikemas dalam beragam tampilan seni budaya yang kerap ditampilkan pada upacara-upacara adat. Di tempat ini juga terdapat situs peninggalan sejarah masa lalu yang masih tetap terpelihara dengan baik.

Di tengah benteng terdapat sebuah masjid tua dan tiang bendera yang usianya seumur masjid. Yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Buton III La Sangaji Sultan Kaimuddin atau dikenal dengan julukan 'Sangia Makengkuna' yang memegang takhta antara tahun 1591-1597. Di dalam benteng Keraton juga terdapat batu Wolio, batu popaua, masjid agung, Istana Badia, dan meriam-meriam kuno, makam-makam, termasuk makam Sultan Murhum (Sultan Buton pertama) dan makam Sultan La Elangi.

Bentuk makam Sultan La Elangi sudah mengalami perubahan dari bentuk aslinya, renovasi dilakukan oleh keluarga Sultan dengan alasan untuk memberi penghormatan kepada leluhurnya, yakni mengganti bahan nisan dan jirat yang awalnya dianggap sudah tua dan kuno dengan bahan nisan yang baru dan lebih kuat.

Kondisi Makam Sultan La Elangi Setelah Renovasi



Kondisi Makam Sebelum Renovasi



Bentuk awal makam Sultan La Elangi, tampaknya cukup sederhana dan tidak menunjukkan kesan mewah sebagaimana layaknya seorang raja. Morfologi makam Sultan hanya terdiri dari nisan tanpa jirat permanen. Bentuk nisan menyerupai menhir tanpa ukiran yang terbuat dari endapan tetesan air gua batu, yang disebut stalaktit atau stalakmit.

Bentuk Nisan Asli



Nisan asli makam Sultan La Elangi terbuat dari batu endapan tetesan air, hal ini dimaksudkan untuk melanggengkan suasana sejuk pada makam. Di mana dalam tradisi masyarakat Islam terdapat ritual ziarah kubur yang biasanya dilakukan dengan menyiramkan air di atas makam, dengan maksud untuk memberikan kesejukan kepada penghuni kuburnya. Sehingga dengan memakai batu dari endapan tetesan air, diharapkan proses tetesan air pada batu tersebut terus menerus termanifestasi di atas makam, sehingga penghuninya kemudian akan senantiasa merasa sejuk di dalamnya.

Stalaktit adalah sejenis mineral sekunder (*speleothem*) yang menggantung di langit-langit gua kapur, atau stalakmit adalah batuan yang terbentuk di lantai gua, hasil tetesan langit-langit yang kemudian menumpuk dan membeku pada lantai gua. Stalaktit dan stalakmit masuk dalam jenis batu tetes (*dripstone*).

Peran Sultan La Elangi

Sultan La Elangi adalah sultan ke-4 yang juga dikenal dengan nama Sultan Dayanu Ikhsanuddin. Sultan La Elangi menjabat selama 37 (1578-1615 M) tahun lamanya. Ada perbedaan dalam penulisan tahun masa jabatan sultan La Elangi. Perbedaan tersebut tertulis dalam nisan kuburan yang tertera tahun 1597-1631 M, yakni selama 34 tahun. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 51). La Elangi berasal dari keturunan bangsawan kaum Tanailandu. Tanailandu adalah salah satu dari tiga golongan bangsawan Buton. Ketiga golongan tersebut adalah Kaum Tanailandu, Kaum Tapi-tapi,

dan Kaum Kumbewaha. Ketiga kaum ini merupakan keturunan dari raja pertama Kerajaan Buton yaitu Wa Kaa Kaa. Wa Kaa Kaa melahirkan Bulawambona-raja Buton ke-2 yang kemudian juga melahirkan Bataraguru-raja Buton ke-3. Anak dari Bataraguru yakni Kayjula menikah dengan Warandea putri dari raja Tiworo yang beranakan Watubapala. Watubala bersuamikan Sugimaru-Raja Muna ke-2 yang kemudian melahirkan Murhum. Murhum adalah Raja Buton ke-6 yang juga merupakan Sultan Buton pertama, dikarenakan di masa pemerintahannya, sistem kerajaan dirubah menjadi sistem kesultanan. Kesultanan terbentuk setelah 20 tahun Raja Murhum menjabat Kerajaan Buton. Raja Murhum menerima kedatangan penyiari Agama Islam yang bernama Syaikh Abdul Wahid. Syaikh Abdul Wahid adalah keturunan arab yang datang dari Gujarat melalui Johor yang juga berprofesi sebagai pedagang selain Penyiari Agama Islam. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 51).

Kembali pada pembahasan tiga golongan bangsawan Buton, pada keturunan Sultan Murhum inilah tiga golongan (Tanailandu, Tapi-tapi, Kumbewaha) bangsawan Buton ini berasal. Sultan Murhum beristrikan Wa Sameka yang melahirkan Wa Sugirampu, Paramasuri, dan Wa Bunganila. Paramasuri bersuamikan La Siridatu yang beranakan salah satunya Sultan La Elangi. Sedangkan Wa Bunganila bersuamikan La Kabaura yang melahirkan La Singga dan La Bula. Dari keturunan La Elangi inilah disebut golongan bangsawan

Tanailandu. Dari keturunan La Singga disebut golongan bangsawan Tapi-tapi dan dari keturunan La Bula disebut golongan bangsawan Kumbewaha. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 62-63).

Pada masa pemerintahan Sultan La Elangi, banyak sistem yang dibuat dan ditata guna kelancaran roda pemerintahan pada saat itu. Diantaranya, undang-undang dasar kesultanan yang sarat dengan konsep Martabat tujuh, syarat-syarat pegawai kesultanan, susunan pegawai kesultanan, tugas pokok pegawai kesultanan, alat-alat kebesaran pegawai kesultanan, syarat/perangkat Agama, pembagian daerah kepemintahan yang juga tercantum di dalamnya undang-undang daerah Barata atau juga disebut daerah otonom, tata tertib musyawarah, *weti* atau pajak, undang-undang pertanahan. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 51).

Tidak hanya itu, sejumlah perjanjian Sultan La Elangi dengan Komandeur Appolonius Schot perwakilan dari Kompeni atau VOC (Vereenigde Oost Indische Kompagnie). Perjanjian persahabatan tersebut diperkuat dan ada beberapa poin yang ditambahkan oleh Pieter Both-Gubernur Jendral Kompeni, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1613. Adapun bunyi perjanjian Sultan Dayyan Ikhsanuddin dengan Kapten Scotte sebagai berikut:

Dari pihak Scotte:

Memberikan bantuan dan perlindungan kepada Kerajaan Buton bila mendapat serangan dari kerajaan lain ataupun pertentangan yang terjadi di dalam Kerajaan Buton. Pihak VOC memberikan 4 buah meriam beserta pelurunya dan juga

tenaga teknis yang mengajarkan penggunaannya

Tidak mengganggu dan menyulitkan rakyat Buton beserta rajanya dan pembesar Kerajaan dalam menjalankan

kepercayaannya/agamanya.

Pihak Kompeni/VOC akan membimbing Sultan dan Pembesar Kerajaan Ternate agar memperingati orang-orang Ternate yang akan datang ke Buton dalam urusan kerajaan harus disertai dengan surat keterangan serta cap resmi dari kerajaan.

Mata uang logam Kompeni sama nilainya dengan uang Kerajaan Buton.

Setelah beberapa bulan perjanjian tersebut berjalan, pihak Kompeni yakni Gubernur Pieter Both kembali memperkuat perjanjian tersebut dengan menambahkan beberapa poin, yakni:

Apabila Sultan La Elangi wafat, maka calon penggantinya adalah Kamaruddin dan Syamsuddin.

Semua bangsa asing seperti Spanyol dan Portugis dan lainnya, dapat bebas berada di Buton dengan persetujuan pihak Kompeni.

Musuh yang membawa barang dengan perahu dari Surabaya dibongkar di Makassar dengan pemberitahuan dari Sultan Buton, maka perahu itu dapat dirampas beserta seluruh muatannya atas hasil pemeriksaan Kompeni. Barang-barang sitaan tersebut sebagian diserahkan kepada Raja Buton dan sebagian sisanya kepada Kompeni.

Dari Pihak Sultan Dayanu Ikhsanuddin:

Memerangi musuh Kerajaan Ternate dan musuh Kompeni.

Memberikan bantuan tentara kepada Kompeni ke Solor ketika perjanjian ini telah resmi ditanda tangani.

Pengawasan penetapan harga atas kebutuhan bahan pokok sehari-hari disepakati dan dipegang teguh.

Tidak mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan yang lain selain dari pihak Kompeni.

Orang-orang Belanda/VOC tidak akan dimintai suatu pembayaran berupa pajak dan diberikan kesempatan berdagang dengan bebas di dalam Kerajaan Buton.

Menerima pemasukan beras terutama dari Maluku.

Tentara Kompeni dapat mengawini perempuan dari kaula Kerajaan Buton yang tidak dalam ikatan pernikahan dan atas kemauannya serta menurut agama suaminya.

Demikian pula pembelian budak oleh Kompeni dengan ketentuan bahwa pelarian budak dari salah satu pihak harus dikembalikan kepada pemiliknya.

Kontrak perjanjian ini juga dimaksudkan dengan perdamaian dan persahabatan dengan Banda. Kecuali bila terjadi perpecahan antara Kompeni dengan orang-orang Banda, maka semua orang Buton yang tinggal di Banda di panggil kembali. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 66-69).

Sumber lain juga disebutkan oleh Schoorl bahwa perjanjian pertama antara Buton dengan VOC terjadi pada tanggal 5 Januari 1613. Dari pihak Kerajaan Buton diwakili oleh Sultan La Elangi, dan dari pihak VOC diwakili oleh Kapten Scotte atas perintah Gubernur Jendral Pieter Both. Adapun redaksi perjanjian dari pihak VOC. Sebagai berikut:

- Orang-orang Belanda akan membantu melindungi negeri serta warganya terhadap penyerbuan-penyerbuan musuh. Untuk itu, di pantai akan dibangun dua buah kubu pertahanan yang diawaki oleh beberapa orang Belanda yang dipersenjatai dengan 4 buah meriam.
- Scotte berjanji untuk memohon kepada Gubernur Jendral agar mengirim lebih banyak garnisun serta sebuah kapal atau sebuah kapal layar.
- Ia juga berjanji secepat-cepatnya menjadi penengah pada Raja Makassar, agar mau meniadakan semua permusuhan terhadap Buton.
- Scotte berjanji untuk mendesak Raja Ternate agar warganya tidak menimbulkan kesusahan bagi Raja Buton atau bagi warganya dan urusan-urusan yang mungkin ada agar diajukan secara baik-baik kepada Raja Buton melalui para duta atau surat-surat yang dibubuhi cap kerajaan.

Sedangkan penambahan pengukuhan perjanjian Belanda oleh Gubernur Jendral Pieter Both pada tanggal 29 Agustus 1613, ditambahkan:

- Apabila raja wafat, maka anak laki-laknya yang sah, Kamaruddin dan Syamsuddin akan menggantikannya.
- Semua bangsa asing, kecuali orang Spanyol dan Portugis bebas datang ke Buton.
- Perahu-perahu yang berlayar antara Surabaya dan Makassar dan mungkin mengangkut barang-barang musuh, boleh diperiksa VOC dengan dihadiri

wakil raja. Barang-barang ini boleh disita dan hasil penyitaannya boleh dibagi-bagi antara raja dan pangeran Belanda.

Dari pihak Sultan Buton redaksi perjanjiannya sebagai berikut:

- Raja menyatakan telah mengundang orang-orang Belanda untuk membantu melindungi kerajaannya serta turut serta dalam perjuangan melawan musuh-musuh, yaitu Raja Ternate, yang dengan Raja Buton hidup bersahabat.
- Raja berjanji membantu orang-orang Belanda dalam pengiriman tentaranya untuk pergi berperang ke Solor. Raja juga berjanji tidak mengizinkan bangsa lain berdagang atau berlalu-lalang, jika hal-hal ini merugikan Belanda. Orang-orang Belanda sebagai pelindung, memperoleh hak-hak istimewa.
- Raja berjanji menetapkan harga mati untuk barang-barang dagangan dan bahan makanan. Orang-orang Belanda boleh berdagang di mana-mana tanpa dipungut upeti atau bea. Mereka juga boleh menanam tanaman, asal raja diberi tahu.
- Raja berjanji akan menyuruh warganya menanam padi untuk kebutuhan di Maluku.
- Raja berjanji bahwa serdadu-serdadu atau orang-orang Belanda lain, boleh kawin dengan perempuan atau anak perempuan yang bebas. Serdadu dan orang Belanda lain tersebut bertempat tinggal di kerajaan. Pada perempuan itu boleh masuk Kristen. Orang-

orang Belanda boleh membeli budak laki-laki atau perempuan. Para budak yang melarikan diri dan mencari perlindungan pada salah satu pihak akan dikembalikan kepada pemiliknya atau mungkin juga diganti rugi sebanyak 10 tanet (kain Buton) untuk setiap budak.

- Raja akan memperingatkan orang-orang Banda agar berpegang teguh pada persekutuan abadi dengan orang-orang Belanda. Jika pecah peperangan antara Belanda dan banda, raja akan memanggil saudara laki-lakinya serta warganya yang ada di Buton kembali ke Buton. (Pim Schoorl, 2003: 18-20).

Melihat dari dua sumber perjanjian antara Sultan La Elangi dengan pihak Belanda di atas, ada beberapa poin yang berbeda. Meski ada empat poin perjanjian dari pihak Belanda yang ditawarkan, perbedaan terlihat dari sumber A.M. Zahari yang mencantumkan bahwa pihak Belanda akan memberikan kebebasan penuh kepada pihak Kesultanan untuk menjalankan kepercayaannya (Agama Islam) dan bahwa mata uang Kesultanan Buton memiliki nilai yang sama terhadap mata uang Kompeni. Dua poin tersebut tidak tercantum pada sumber yang dipaparkan oleh Pim Schoorl. Dua poin berbeda yang dicantumkan Schoorl yakni, bahwa pihak Belanda akan mengirimkan garsium dan sebuah kapal kepada Kesultanan Buton, dan pihak Belanda juga menjanjikan akan menjadi penengah bagi Raja Makassar agar meniadakan permusuhan dengan pihak Kesultanan Buton. Sedangkan poin

perjanjian kedua antara pihak Kesultanan Buton dan Pihak Belanda yang diwakili Gubernur Jendral Pieter Both, tiga poin yang dipaparkan dari sumber A.M. Zahari dan Schoorl memiliki kandungan yang sama. Di sisi lain, kedua sumber (A.M. Zahari dan Schoorl) yang menerangkan perjanjian dari pihak Kesultanan Buton memiliki kandungan yang sama.

Di antara banyaknya sistem dan perundang-undangan yang dibuat, undang-undang dasar kesultanan Buton berdasarkan konsep Martabat tujuh-lah yang dianggap paling menarik. Undang-undang martabat tujuh atau juga disebut Murtabat tujuh di tetapkan pada tahun 1610. Penyusunan undang-undang tersebut banyak mendapat masukan dan nasehat dari Syarif Muhammad keturunan Arab.

Selain di tanah Buton, konsep martabat tujuh juga ditemukan di Aceh. Martabat tujuh merupakan konsep wujudiyah sebagai penjawantahan Diri Tuhan melalui ciptaan-Nya yang terdiri dari tujuh tingkatan, yakni: martabat pertama *Ahadiyah* atau *la> Ta'ayun*, martabat kedua *Wahdah* atau *ta'ayyun al-awwal*, martabat ketiga *Wahidiyah* atau *ta'ayyun al-tsa>ni>*, Martabat keempat *a>lam al-arwa>h*, Martabat kelima *a>lam Misal*, Martabat keenam *a>lam al-ajsa>m* atau, dan martabat ketujuh martabat *al-Insa>n*. (Abdul Rahim Yunus, 1995: 54-55).

Berbeda dengan daerah lainnya, selain konsep martabat tujuh ini dikenal di tanah Buton, konsep ini juga dijewantahkan dalam undang-undang Kesultanan. Pada sultan Dayanu Ikhsanuddin kandungan

undang-undang tersebut sebagai berikut:

1. Martabat (Murtabat) ahadiyah adalah kelompok Tanailandu
2. Martabat (Murtabat) wahdah adalah kelompok Tapi-tapi
3. Martabat (Murtabat) wahidiyah adalah kelompok Kumbewaha
4. Martabat (Murtabat) alam arwah adalah Sultan
5. Martabat (Murtabat) alam amtsal adalah Sapati
6. Martabat (Murtabat) alam ajsam adalah Kenepulu
7. Martabat (Murtabat) alam insan adalah Kapitan Laut

Dalam perjalanannya, Undang-undang Murtabat Tujuh juga mengalami perubahan. Pada masa Sultan La Saparagau-Sultan ke-7, susunannya dirubah pada martabat keempat:

1. Martabat (Murtabat) ahadiyah adalah kelompok Tanailandu
2. Martabat (Murtabat) wahdah adalah kelompok Tapi-tapi
3. Martabat (Murtabat) wahidiyah adalah kelompok Kumbewaha
4. Martabat (Murtabat) alam arwah adalah Sapati
5. Martabat (Murtabat) alam amtsal adalah Kenepulu
6. Martabat (Murtabat) alam ajsam adalah Lakina Sorawolio
7. Martabat (Murtabat) alam insan adalah Kapitan Laut. (Achadiati Ikram, 2005: 56-57).

Keterangan di atas diperoleh dari naskah kuno peninggalan kesultanan. Sumber tersebut berasal pada abad ke-19. Ada beberapa sumber yang berasal dari masa

Sultan Muhammad Aydrus (1824-1851), juga juga sumber yang berasal dari masa Sultan Muhaammad Isa, sebagaimana keterangan dari Achadiati Ikran dalam *Istiadat Tanah Negeri Butun (Edisi Teks dan Komentari)*. (Achadiati Ikram, 2005: 12-13).

Setelah kurang lebih 34 tahun Sultan La Elangi memimpin Kesultanan Buton, ia wafat pada tahun 1615 yang di makamkan di daerah Tanailandu dalam benteng keraton. Ia meninggalnya beberapa orang putra diantaranya:

1. La Balawo – Sultan ke-5.
2. La Cila – Sultan ke-8.
3. La Tumpamana – Sultan ke-12
4. La Sinuru Sangia Labalawa.
5. Laodeode Sangia I-Ea – Raja Kalingsusu. (Abdul Mulku Zahari, 1977: 55).

Penutup

Bentuk awal makam Sultan La Elangi cukup sederhana dan tidak menunjukkan kesan mewah sebagaimana layaknya seorang raja. Morfologi makam Sultan hanya terdiri dari nisan tanpa jirat permanen. Bentuk nisan menyerupai menhir tanpa ukiran yang terbuat dari endapan tetesan air gua batu, yang disebut stalaktit atau stalakmit. Hal ini dimaksudkan untuk melanggengkan suasana sejuk pada makam. Di mana dalam tradisi masyarakat Islam terdapat ritual ziarah kubur yang biasanya dilakukan dengan menyiramkan air di atas makam, dengan maksud untuk memberikan kesejukan kepada penghuni kuburnya. Sehingga dengan memakai batu dari endapan tetesan air, diharapkan proses tetesan air pada batu tersebut terus menerus

termanifestasi di atas makam, sehingga penghuninya kemudian akan senantiasa merasa sejuk di dalamnya.

Pada masa pemerintahan Sultan La Elangi, banyak sistem yang dibuat dan ditata guna kelancaran roda pemerintahan pada saat itu. Diantaranya, undang-undang dasar kesultanan yang sarat dengan konsep Martabat tujuh, syarat-syarat pegawai kesultanan, susunan pegawai kesultanan, tugas pokok pegawai kesultanan, alat-alat kebesaran pegawai kesultanan, syarat/perangkat Agama, pembagian daerah pemerintahan yang juga tercantum di dalamnya undang-undang daerah Barata atau juga disebut daerah otonom, tata tertib musyawarah, *weti* atau pajak, undang-undang pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Zahari, Abdul Mulku. 1977. *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni* Jakarta: Depdiknas.
- Yunis, Abdul Rahim. 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad ke-19* Jakarta: INIS.
- Ikram, Achadiati. 2005. *Istiadat Tanah Negeri Butun: Edisi Teks dan Komentar* Jakarta: Djambatan.
- Hafid, Anwar dan Misran Safar. 2007. *Sejarah Kota Kendari*. Bandung: Humaniora.
- Irmawati dan M-Johan, 2012. Boundedness dan Polusi dalam Situs Islam Cirebon abad ke 16-18. Makalah: Diklat Arkeologi Kementerian Agama
- Junardi. 2008. Wisata Religi Astana Giribangu, <http://m.wisatamelayu.com/id/tour/835-Wisata-Religi-Astana-Giribangun/navgeoj>. Akses 1 Desember 2014
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton* Jakarta: Djambatan, terj. G.Winaya.
- Santing, Waspada (eds). 2010. *Ulama Perintis; Biografi Mini Ulama Sulsel*. Makassar: Pustaka Az-Zikra.
- Tjandrasasmita, Uka. 1999. "Dampak Perpecahan Politik di Kerajaan Cirebon kepada penempatan Kubur Raja-raja di kompleks makam Sunan Gunung Jati, Gunung Sembung, dalam Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Denys Lombard, Henry Chambert-Loir dkk (editor) Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.